



Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis: Migrasi, Perekonomian, dan Relasi dengan Masyarakat Pribumi

Aisyah Salsabila¹, Ahmal²

^{1,2}Universitas Riau

E-mail: aisyah.salsabila3882@student.unri.ac.id¹, ahmal@lecturer.unri.ac.id²

Article Info

Article history:

Received July 18, 2026

Revised July 20, 2026

Accepted July 25, 2026

Keywords:

Migration, Ethnicity, Chinese, Economy, Social Relations

ABSTRACT

The presence of ethnic Chinese in Bengkalis Regency, Riau Province, is an inseparable part of the socio-economic dynamics of coastal communities that have persisted for several generations, since the Dutch East Indies colonial period to the contemporary era. This study aims to (1) trace the historical background of migration and economic development of the Chinese community in Bengkalis Regency from the colonial period to the present, and (2) identify the relationship between the Chinese community and the indigenous community in Bengkalis Regency today. This study uses a qualitative approach with library research methods, the data of which are obtained through searches of historical archives and related academic journals. The results of the study indicate that the migration of the Chinese community to Bengkalis took place gradually through sea and river routes since the Malacca Strait trade era, then consolidated during the colonial period through the panglong industry which was characterized by unequal power relations, and continued to develop to form economic dominance in the retail trade and capture fisheries sectors today. The relationship between the Chinese and indigenous communities demonstrates a close and interdependent economic pattern within a patron-client framework, accompanied by a gradual process of socio-cultural integration, supported by increasingly inclusive post-reform local government policies. This research contributes by comprehensively connecting the historical sequence of migration and the economy of the Chinese community in Bengkalis from the colonial period to the present, while also linking it to the dynamics of their social relations in the contemporary era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 18, 2026

Revised July 20, 2026

Accepted July 25, 2026

Kata Kunci:

Migrasi, Etnis, Tionghoa, Ekonomi, Relasi Sosial

ABSTRAK

Keberadaan etnis Tionghoa di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan bagian tidak terpisahkan dari dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang telah berlangsung selama beberapa generasi, sejak masa kolonial Hindia Belanda hingga era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menelusuri latar belakang historis migrasi dan perkembangan perekonomian masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis dari masa kolonial hingga saat ini, serta (2) mengidentifikasi hubungan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi di Kabupaten Bengkalis saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang datanya diperoleh melalui penelusuran arsip historis dan jurnal-jurnal akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan



bahwa migrasi masyarakat Tionghoa ke Bengkalis berlangsung secara bertahap melalui jalur laut dan sungai sejak masa perdagangan Selat Malaka, kemudian terkonsolidasi pada masa kolonial melalui industri panglong yang diwarnai relasi kuasa yang timpang, dan terus berkembang hingga membentuk dominasi ekonomi pada sektor perdagangan eceran dan perikanan tangkap di masa kini. Adapun hubungan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi menunjukkan pola relasi ekonomi yang erat dan saling bergantung dalam bingkai patron–client, diiringi proses pembauran sosial-budaya yang terus berkembang secara bertahap, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang semakin inklusif pascareformasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghubungkan secara utuh rangkaian historis migrasi dan perekonomian masyarakat Tionghoa di Bengkalis dari masa kolonial hingga kini, sekaligus mengaitkannya dengan dinamika relasi sosialnya di masa kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Aisyah Salsabila

Universitas Riau

E-mail: aisyah.salsabila3882@student.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Di samping penduduk asli, wilayah ini juga menjadi tempat tinggal bagi kelompok masyarakat keturunan, seperti etnis Tionghoa, Arab, dan India. Jika ditelusuri dari sisi historisnya, keberadaan etnis Tionghoa di tanah Riau ternyata telah berlangsung sejak masa yang cukup lampau. Seiring dengan ramainya perairan Melaka sebagai jalur perdagangan internasional. Keahlian berdagang orang Tionghoa sudah diakui oleh orang Melayu di Riau (Wilaela, 2016; Arman, 2018). Salah satu wilayah di Riau yang memiliki interaksi dengan orang Tionghoa adalah Bengkalis. Secara geografis, Pulau Bengkalis diapit oleh Selat Malaka di sisi Timur, Utara, dan Barat, sementara di bagian selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis. Letak yang strategis ini, yakni bersisian langsung dengan kedua selat tersebut, membuat Bengkalis berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat kepelabuhanan pada masanya (Misda & Darwis, 2019; Muhammad Isa Selamat & Junery, 2021). Berkat posisi strategis itu pula, Bengkalis tumbuh sebagai kawasan perdagangan yang maju, dengan jalur transportasi air berperan sebagai akses utama keluar-masuknya barang maupun manusia menuju daratan Sumatera. Kondisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi etnik Tionghoa, mengingat mereka cenderung memilih bermukim di kawasan kepulauan. Bagi wilayah kepulauan, keberadaan pelabuhan memegang peranan sentral sebagai penggerak utama roda perekonomian dan perdagangan.

Keberadaan etnis Tionghoa di berbagai wilayah pesisir Sumatera, termasuk di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan bagian tidak terpisahkan dari dinamika sosial ekonomi masyarakat lokal yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Migrasi



masyarakat Tionghoa ke wilayah ini pada umumnya terjadi melalui jalur laut dan sungai, dengan latar belakang etnis yang beragam Menurut Vasany dalam Kuntjaraningrat (1993), ada 4 sub-etnik Tionghoa di Indonesia seperti Hainan, Hakka, Tio Ciu, dan Hokkian, yang kemudian membentuk pola interaksi intensif dengan masyarakat pribumi setempat, di mana sungai menjadi jalur utama distribusi hasil bumi dan sekaligus sarana pertemuan antara pendatang Tionghoa dengan masyarakat lokal. Kehadiran mereka tidak hanya membawa modal ekonomi, tetapi juga etos kerja dan jaringan dagang yang lambat laun menempatkan etnis ini pada posisi strategis dalam struktur perekonomian daerah pesisir.

Secara historis, keterlibatan etnis Tionghoa di Bengkalis erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kajian arsip menunjukkan bahwa Bengkalis pada masa itu bukan hanya sentra penghasil tembakau, melainkan juga pusat industri kayu atau panglong yang terhubung dengan pasar internasional. Di balik geliat ekonomi tersebut, terdapat pula sisi kelam berupa praktik kerja paksa melalui sistem jerat utang yang banyak menimpa buruh, terutama dari kalangan etnis Tionghoa, sehingga menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi kolonial di wilayah ini tidak lepas dari relasi kuasa yang timpang antara pengusaha, pemerintah kolonial, dan pekerja migran (Dita, Vernandi H, Melysa, Rizqon, & Ahmal, 2025).

Pada tataran masyarakat lokal, khususnya di kawasan pesisir seperti Desa Meskom, eksistensi etnis Tionghoa memiliki peran yang sangat signifikan dan sulit dipisahkan dari kehidupan komunitas setempat. Penelitian terkait hal ini menegaskan bahwa keberadaan etnik Tionghoa di komunitas desa pantai Meskom sangat menentukan dan menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan warga pesisir, karena secara ekonomi mereka cukup memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat setempat (Yasin, 2017). Kondisi ini memperlihatkan adanya relasi saling ketergantungan antara etnis Tionghoa dan penduduk pribumi dalam menjalankan roda perekonomian di tingkat lokal, yang terbentuk melalui proses akulturasi dan interaksi ekonomi yang berlangsung lama.

Dari perspektif sosial-budaya, keberhasilan ekonomi masyarakat Tionghoa kerap dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianut secara turun-temurun, termasuk ajaran dan etika kerja yang bersumber dari tradisi leluhur mereka. Beberapa kajian bahkan secara khusus mengarah pada analisis nilai-nilai ajaran Konghucu sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan ekonomi etnik Tionghoa di wilayah pesisir Riau. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, peran etnis Tionghoa dalam dunia perdagangan juga tidak lepas dari persoalan identitas, di mana posisi mereka dalam perekonomian terkait erat dengan ideologi, kuasa ekonomi, kultur dagang, dan *stereotype* sosial yang telah berlangsung lama (Ginting & Andayani, 2012). Dinamika inilah yang menjadikan kajian sosial ekonomi etnis Tionghoa menarik untuk ditelusuri lebih jauh, khususnya dalam konteks kedaerahan seperti Bengkalis.

Meskipun beberapa kajian terdahulu telah menyinggung peran ekonomi etnis Tionghoa di Riau maupun di Kabupaten Bengkalis, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat parsial: sebagian hanya menyoroti satu periode tertentu, misalnya era kolonial (Dita, Vernandi H, Melysa, Rizqon, & Ahmal, 2025), atau satu daerah tertentu, misalnya Desa Meskom (Yasin, 2017), tanpa menghubungkan secara utuh rangkaian historis dari masa kolonial hingga masa kini dengan dinamika sosial-ekonominya. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan memadukan pendekatan historis dan sosial-ekonomi secara komprehensif.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelusuri latar belakang historis migrasi dan perkembangan perekonomian masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis dari masa kolonial hingga saat ini; (2) mengidentifikasi hubungan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi di Kabupaten Bengkalis saat ini. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perekonomian masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis.

METODE PENELITIAN

Dalam menulis artikel ini, peneliti memakai pendekatan kualitatif dengan metode penelitian keperpusustakaan (*library research methods*). *Library Research Methods* merupakan suatu kegiatan penelitian dengan metode pengumpulan informasi dan data berdasarkan berbagai macam materi dan sumber yang didapatkan. Dari berbagai referensi tersebut, kemudian peneliti mengolah data dan informasi yang didapatkan dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Migrasi Dan Perkembangan Perekonomian Masyarakat Tionghoa Di Kabupaten Bengkalis Dari Masa Kolonial Hingga Saat Ini

Migrasi masyarakat Tionghoa ke Kabupaten Bengkalis berlangsung secara bertahap melalui jalur laut dan sungai, seiring dengan ramainya Selat Malaka sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Empat sub-etnik utama yang bermigrasi ke wilayah ini adalah Hainan, hakka, Tio Ciu, dan Hokkian (Vasany dalam Kuntjaraningrat, 1993), yang masing-masing membawa keahlian dalam jaringan dagang yang berbeda. Posisi geografis Bengkalis yang diapit Selat Malaka di sisi Timur, Utara, dan Barat menjadikan wilayah ini pusat kepelabuhan yang strategis, sehingga menjadi daya tarik bagi etnis Tionghoa yang cenderung memilih bermukim di kawasan kepulauan dengan akses pelabuhan (Misda & Darwis, 2019; Muhammad Isa Selamat & Journey, 2021).

Pada masa kolonial Hindia Belanda awal abad ke-20, dalam jurnal Dita, dkk (2025) mengatakan, keberadaan etnis Tionghoa di Bengkalis semakin terkonsolidasi seiring berkembangnya industri kayu (panglong) yang terhubung dengan pasar internasional, di samping sektor tembakau yang telah lebih dahulu berkembang. Kajian arsip menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tersebut turut diwarnai praktik kerja paksa melalui sistem jerat utang yang banyak menimpa buruh Tionghoa, yang mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara pengusaha, pemerintah kolonial, dan pekerja migran pada masa itu.

Memasuki periode pascakolonial hingga kontemporer, pola pemukiman etnis Tionghoa di Bengkalis mengarah pada penguatan komunitas di kawasan pesisir, pola pascakolonial di Bengkalis bergeser dari segregasi administratif (kolonial) menjadi klaster fungsional ekonomi Tionghoa tetap terkonsentrasi di titik-titik strategis dekat sumber daya/infrastruktur ekonomi, berdampingan dengan warga Melayu, tapi hubungan sosial-ekonominya tetap hierarkis dan agak tertutup secara kultural (Yasin, 2017).

Perkembangan masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis pada masa kini menunjukkan babak baru dalam relasi sosial antaretnis, setelah melalui perjalanan panjang sejak era kolonial hingga pascareformasi. Pemerintah daerah kini secara terbuka menegaskan komitmennya



terhadap kesetaraan seluruh kelompok etnis, termasuk masyarakat Tionghoa, dalam pembangunan infrastruktur maupun penyaluran bantuan sosial. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang menyatakan bahwa semua suku, baik Melayu, Minang, Batak, Sakai, Tionghoa maupun suku lainnya, adalah satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam segala sisi pembangunan. Pernyataan ini diperkuat oleh testimoni warga Tionghoa Kecamatan Bukit Batu, yang mengakui bahwa selama masa kepemimpinannya, pemberian bantuan sosial tidak pernah tebang pilih dari suku apapun, sekaligus mencatat adanya penyaluran bantuan rumah ibadah kepada komunitas Tionghoa di Kabupaten Bengkalis (Bursa Kota, 2024).

Dari aspek kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap prinsip kesetaraan dalam pembangunan. Pemerintah tidak pernah tebang pilih dalam membangun infrastruktur, memberikan bantuan sosial, maupun menghadiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat Tionghoa. Sikap inklusif semacam ini menjadi penanda penting bahwa pembauran sosial-budaya yang dahulu sulit terwujud kini semakin mendapatkan ruang, seiring menguatnya semangat kesetaraan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Fenomena ini turut tercermin dalam ranah budaya, khususnya pada perayaan Hari Raya Imlek yang berlangsung di Bengkalis. Perayaan Imlek di Bengkalis memang selalu memiliki keunikan tersendiri, di mana tradisi leluhur tetap terjaga dengan baik, namun pada saat yang sama mampu menjadi hiburan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat. Momentum Imlek dengan demikian bukan lagi sekadar ritual internal komunitas, melainkan telah menjadi bagian dari identitas budaya bersama masyarakat Bengkalis yang majemuk. Selain itu peran etnis Tionghoa dalam sektor perdagangan di Bengkalis bukan fenomena baru, melainkan kelanjutan dari pola historis yang telah berlangsung sejak era kolonial hingga kini. Di pasar-pasar tradisional maupun modern di Kabupaten Bengkalis, aktivitas jual-beli sebagian besar masih dilakukan oleh pedagang keturunan Tionghoa, baik dalam skala grosir maupun eceran. Pola ini konsisten dengan temuan riset sebelumnya di komunitas pesisir Bengkalis yang mana untuk sektor perdagangan eceran (Desa Ketamputih, Kec. Bengkalis) pengusaha Tionghoa lebih ulet, kerja dari subuh, berani ambil risiko, sehingga usahanya bertahan dan berkembang, dibanding pengusaha Melayu setempat yang cenderung kurang kompetitif (*Ilham dkk., 2022, J-ESA*). Sedangkan dalam Sektor perikanan tangkap (Desa Meskom, Kec. Bengkalis) meski jumlah penduduknya kecil, etnis Tionghoa (tauke) menguasai mayoritas kapal & alat tangkap skala besar, sementara nelayan Melayu memakai sarana lebih kecil dan bekerja dalam hubungan patron–client dengan tauke (*Yasin, 2017, Sosial Budaya*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis saat ini bergerak ke arah integrasi sosial yang semakin matang, yang mana perkembangan migrasi masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis dari dulu hingga sekarang bergerak melalui beberapa fase transformasi yang saling berkesinambungan: dimulai dari migrasi perdagangan bebas pada masa pra-kolonial, berlanjut ke migrasi kerja paksa berskala besar melalui sistem panglong pada era kolonial, kemudian mengalami migrasi balik akibat tekanan politik pasca-kemerdekaan, memasuki fase stagnasi migrasi dengan konsolidasi ekonomi secara diam-diam pada masa Orde Baru, hingga akhirnya berada pada kondisi tanpa migrasi baru namun diiringi keterbukaan sosial-budaya pada era pascareformasi. Dengan demikian, populasi Tionghoa yang ada di Bengkalis saat ini pada dasarnya merupakan hasil dari proses asimilasi dan pewarisan generasi dari gelombang migrasi kolonial, bukan produk



migrasi baru, sehingga eksistensinya lebih ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dan mempertahankan jaringan ekonomi-sosial secara turun-temurun ketimbang oleh arus migrasi yang berkelanjutan.

2. Hubungan Masyarakat Tionghoa Dengan Masyarakat Pribumi Di Kabupaten Bengkalis Saat Ini

Relasi antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi (Melayu) di Kabupaten Bengkalis saat ini dapat dilihat dari dimensi interaksi ekonomi, dinamika sosial-spasial, dan sikap kelembagaan pemerintah daerah. Dari sisi ekonomi, penelitian Yasin (2017) di komunitas pesisir Desa Meskom menemukan bahwa interaksi antaretnik berlangsung melalui hubungan patron–client, di mana etnik Tionghoa berperan sebagai tauke pemilik modal dan armada perikanan, sementara etnik Melayu berperan sebagai pengelola maupun buruh nelayan. Pola relasi ini bukan semata hubungan eksploitatif satu arah, melainkan saling menguntungkan, sebab tauke memperoleh tenaga kerja dan kepercayaan (hsin yung) dari mitra lokal, sementara nelayan Melayu memperoleh akses modal, kemudahan pinjaman tanpa birokrasi rumit, dan jaminan pasar bagi hasil tangkapannya. Yasin (2017) bahkan mencatat bahwa relasi semacam ini dapat berlangsung antargenerasi, menunjukkan tingkat kepercayaan yang terbangun cukup kuat meski dalam kerangka hierarkis antara tauke dan klien. Kondisi serupa turut dikonfirmasi oleh Ilham dkk. (2022) di Desa Ketamputih, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengusaha Tionghoa dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya turut memberi ruang ekonomi bagi masyarakat sekitar, meski di sisi lain menciptakan kesenjangan daya saing dengan pengusaha lokal.

Dari sisi pemukiman, Yasin (2017) menegaskan bahwa pola pemukiman etnik Tionghoa di kawasan pesisir Bengkalis pascakolonial tidak lagi tersegregasi ketat seperti pada era kolonial, melainkan tersebar di titik-titik strategis yang berdampingan dengan pemukiman etnik Melayu. Namun demikian, hubungan sosial-ekonomi yang terbentuk tetap bersifat hierarkis dan relatif tertutup secara kultural, sebab interaksi harian yang berjalan lancar dalam konteks transaksi ekonomi belum tentu berbanding lurus dengan pembauran sosial-budaya yang lebih mendalam. Catatan historis turut menunjukkan bahwa proses pembauran ini belum sepenuhnya tuntas, dengan tercatatnya insiden ketegangan antaretnis di Kabupaten Bengkalis pada 15 September 1998 dan 20 April 2013 (Yasin, 2017), yang mengindikasikan bahwa kedekatan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan integrasi sosial yang menyeluruh. Pada tataran kebijakan, terdapat pergeseran yang cukup positif pascareformasi. Bupati Bengkalis, Kasmarni, menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap kesetaraan seluruh kelompok etnis, termasuk masyarakat Tionghoa, tanpa membedakan dalam pembangunan infrastruktur maupun penyaluran bantuan sosial (Bursa Kota, 2024). Pernyataan ini diperkuat oleh testimoni warga Tionghoa Kecamatan Bukit Batu yang mengonfirmasi bahwa penyaluran bantuan tidak pernah terbang pilih berdasarkan suku (Bursa Kota, 2024). Keterbukaan ini juga tampak dalam ranah budaya, di mana perayaan Imlek di Bengkalis, termasuk tradisi Pawai Penyemahan Tatung/Kitong, kini menjadi ruang temu lintas etnis yang melibatkan partisipasi warga di luar komunitas Tionghoa, bahkan mendapat dukungan resmi dari aparat pemerintah daerah sebagai bagian dari potensi budaya-pariwisata (RRI.co.id, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi di Kabupaten Bengkalis saat ini merupakan relasi yang secara ekonomi



erat dan saling bergantung, sementara secara sosial-kultural masih berada dalam proses pembauran yang terus berkembang secara bertahap. Kedekatan spasial dan kepentingan ekonomi bersama menjadi fondasi penting bagi terjalinnya hubungan tersebut, meski masih terdapat ruang bagi penguatan interaksi sosial-budaya yang lebih mendalam ke depannya. Perkembangan kebijakan pemerintah daerah yang semakin inklusif pascareformasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong proses integrasi ini ke arah yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran historis dan sosial-ekonomi yang telah diuraikan, penelitian ini menjawab dua tujuan yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Pertama, terkait latar belakang historis migrasi dan perkembangan perekonomian masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa migrasi tersebut berlangsung secara bertahap melalui beberapa fase yang saling berkesinambungan, dimulai dari migrasi perdagangan melalui jalur laut dan sungai pada masa awal ramainya Selat Malaka, berlanjut ke masa kolonial Hindia Belanda dengan terkonsolidasinya industri panglong dan tembakau yang turut diwarnai relasi kuasa yang timpang antara pengusaha, pemerintah kolonial, dan pekerja migran, hingga memasuki masa pascakolonial yang menandai pergeseran pola pemukiman dari segregasi administratif menjadi klaster fungsional-ekonomi. Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa kini, di mana masyarakat Tionghoa tetap memegang peran signifikan dalam perekonomian lokal, khususnya pada sektor perdagangan eceran dan perikanan tangkap, yang ditopang oleh etos kerja, jaringan usaha, dan penguasaan modal yang terbentuk secara turun-temurun.

Kedua, terkait hubungan masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi di Kabupaten Bengkalis saat ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi tersebut bersifat erat dan saling bergantung dari sisi ekonomi, terutama melalui pola hubungan patron-client antara tauke Tionghoa dan mitra kerja pribumi. Dari sisi sosial-spasial, pola pemukiman yang kini berdampingan turut mendorong intensitas interaksi sehari-hari, meskipun proses pembauran sosial-budaya secara lebih mendalam masih terus berkembang secara bertahap. Dukungan kebijakan pemerintah daerah yang semakin inklusif pascareformasi, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyaluran bantuan sosial, maupun apresiasi terhadap perayaan budaya seperti Imlek, turut menjadi faktor pendorong penting bagi terciptanya relasi antaretnis yang semakin harmonis di Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara umum bahwa dinamika perekonomian masyarakat Tionghoa di Kabupaten Bengkalis merupakan hasil dari proses historis panjang yang saling berkaitan dengan pola relasi sosialnya terhadap masyarakat pribumi, di mana keduanya terus mengalami transformasi menuju arah integrasi yang lebih matang dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, D. (2018, February 23). Kawasan Pecinan Siak yang Kini Jadi Kenangan. *Indonesia: Platform Kebudayaan*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnb-kepri/kawasan-pecinan-siak-yang-kini-jadi-kenangan/>
- Bursa Kota. (2024, 16 November). Masyarakat Tionghoa Kecamatan Bukit Batu beri dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 1. Bursa Kota.



- Dita, A. S., Vernandi H, A., Melysa, D., Rizqon, M., & Ahmal. (2025). Analisis kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap daerah Bengkalis pada zaman kolonial: Studi kasus agama, ekonomi, kerja paksa (panglong), dan peraturan pajak. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 170–179.
- Ginting, D. H., & Andayani, T. (2012). Peranan masyarakat Tionghoa dalam perdagangan perekonomian di Kota Binjai pada tahun 1968-2008. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 23–34.
- Ilham, M., Saifullah, Hafida, N., & Al Fajar, M. R. (2022). Perbandingan etos kerja pengusaha di Desa Ketamputih Kecamatan Bengkalis. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2), 74–84.
- Misda, A., & Darwis, M. (2019). Sosial masyarakat suku asli; Eksistensi Proto-Melayu di Pulau Bengkalis era modernitas. *Akademika*, 15(2), 19–29. <http://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/akademika/article/view/79>
- RRI.co.id. (2025, 29 Januari). Masyarakat Tionghoa Bengkalis rayakan Imlek dengan meriah.
- Selamat, M. I., Ishak, K., & Junery, M. F. (2021). Bengkalis sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan era Kesultanan Melayu. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance*, 3(2), 40–51. https://doi.org/10.24191/jipsf/v3n22021_40-51
- Yasin, A. (2017). Hegemoni ekonomi etnik Tionghoa di pesisir Kabupaten Bengkalis Riau. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, 14(2).